

Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tanjung lapang Kabupaten Malinau

Robertson¹, Erick Karumia², Tinik Sugiarti³

Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan

sultankafung@gmail.com



©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *The utilization of Village Funds is an important factor for the Indonesian government to encourage rural development, community empowerment, and improving the welfare of citizens, in line with global trends that show that investment in villages can strengthen the economic capacity of communities and increase access to basic services. In Tanjung Lapang Village, the effectiveness of village fund utilization is a concern because challenges related to management, the capacity of village officials, and community involvement still arise, so that development results are not always optimal. This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund utilization in Tanjung Lapang with acto on development outcomes, community involvement, and village financial governance, as well as explore the factors that support and hinder the success of the program and its implications for the welfare of the local community. A qualitative approach with a case study method was used, where data were collected through in-depth interviews with village officials, community members, and acto stakeholders, as well as through observation and study of official documents related to village fund management. Thematic analysis was conducted to identify patterns, challenges, and best practices in the utilization of Village Funds. The results show that the effectiveness of Village Fund utilization in Tanjung Lapang is influenced by active community involvement, the capacity of village officials, and the application of transparency and accountability principles, while limited human resources and lack of coordination between parties are the main inhibiting factors. These findings provide practical implications for village fund managers in designing more effective management strategies that have a tangible impact on village development and community well-being.*

Keywords: *Village Funds, effectiveness, community empowerment, governance, rural development*

Abstrak: Pemanfaatan Dana Desa menjadi faktor penting pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga, sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa investasi pada desa dapat memperkuat kapasitas ekonomi komunitas dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Di Desa Tanjung Lapang, efektivitas pemanfaatan dana desa menjadi perhatian karena tantangan terkait pengelolaan, kapasitas aparatur desa, dan keterlibatan masyarakat masih muncul, sehingga hasil pembangunan belum selalu optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dengan acto pada hasil pembangunan, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola keuangan desa, serta mengeksplorasi actor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat

desa, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan, serta melalui observasi dan studi dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar pihak menjadi penghambat utama. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola dana desa dalam merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi pembangunan desa dan kesejahteraan warga.

Kata kunci: Dana Desa, efektivitas, pemberdayaan masyarakat, tata kelola, pembangunan pedesaan

PENDAHULUAN

Pemanfaatan dana desa menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara global, alokasi dana untuk pembangunan desa atau wilayah pedesaan terus meningkat sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pembangunan inklusif, di mana pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan komunitas terbukti meningkatkan capaian layanan dasar dan partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan (Hartojo et al., 2023). Menurut laporan Bank, investasi langsung pada pembangunan desa terbukti dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperkuat kapasitas ekonomi lokal, dan mendorong partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini menekankan pentingnya efektivitas penggunaan dana publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan yang merata (Hartojo et al., 2023).

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Dana Desa menyalurkan dana yang signifikan setiap tahunnya dengan tujuan mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal (Anggara & Pribadi, 2024; Astutik & Fitriyah, 2025). Namun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa tantangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa masih terjadi, seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, serta pengawasan yang belum optimal terhadap pelaksanaan program (Ahmad & Susilawati, 2025; Arifin et al., 2023). Penelitian juga menemukan bahwa meskipun alokasi dana desa telah berjalan sesuai perencanaan, efektivitasnya dalam mencapai target pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya optimal karena hambatan dalam partisipasi masyarakat dan kapasitas administrasi lokal (Anggara & Pribadi, 2024; Astutik & Fitriyah, 2025). Hal ini menunjukkan kebutuhan yang mendesak untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan dana desa di tingkat lokal agar program ini dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Dana Desa telah diterapkan secara luas, penelitian yang secara spesifik mengukur efektivitas pemanfaatannya di konteks yang lebih mikro seperti desa-desa kecil masih terbatas dalam literatur akademik yang lebih mapan, terutama yang menekankan pada hasil pembangunan, partisipasi masyarakat dan tata kelola. Beberapa studi telah menilai efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam konteks pembangunan fisik dan ekonomi pedesaan, namun fokusnya lebih banyak pada indikator output seperti infrastruktur

atau dampak ekonomi makro daripada pada kualitas keterlibatan masyarakat dan efek jangka panjang terhadap kesejahteraan komunitas lokal (Astutik & Fitriyah, 2025; Saptayuda, 2024). Literatur juga mencatat bahwa partisipasi masyarakat dan tata kelola yang baik merupakan determinan penting dalam efektivitas kebijakan Dana Desa, tetapi ada variasi hasil yang menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas belum sepenuhnya optimal di banyak lokasi studi sehingga menimbulkan gap riset yang penting (Ashar & Rosnawati, 2025; Saptayuda, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi efektivitas pemanfaatan Dana Desa dari perspektif hasil pembangunan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola keuangan desa, dengan pendekatan yang lebih holistik terhadap outcome pembangunan lokal (Ashar & Rosnawati, 2025; Saptayuda, 2024).

Rumusan masalah penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas tersebut, dan sejauh mana pelaksanaan dana desa selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program, serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di tingkat lokal.

Kontribusi penelitian ini bersifat ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai pengelolaan dana desa, efektivitas pembangunan pedesaan, dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola keuangan desa. Dari perspektif teoritis, penelitian ini dapat menguatkan model evaluasi efektivitas program publik dengan mempertimbangkan aspek partisipasi, transparansi, dan dampak sosial-ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah desa, pemangku kebijakan, dan praktisi pembangunan dalam merancang strategi pemanfaatan dana desa yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Tanjung Lapang.

Pengembangan Teori

Teori utama yang relevan dengan topik efektivitas pemanfaatan Dana Desa berakar pada teoriefektivitas program publik dan teori desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan lokal. Dalam literatur kebijakan publik, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat dan berdampak bagi masyarakat penerima manfaat, di mana efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pengelolaan anggaran desa (Ashsifa et al., 2023; Rahayu et al., 2023). Teori desentralisasi fiskal menyatakan bahwa alokasi dana langsung ke unit pemerintahan lokal seperti desa dapat meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat dan perbaikan layanan publik, karena pemerintah desa memiliki otonomi fiskal yang lebih besar untuk menyesuaikan alokasi sumber daya dengan prioritas lokal yang spesifik (Neyapti, 2025). Konsep ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang baik, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kesinambungan dalam penggunaan Dana Desa agar manfaat nyata dapat dirasakan oleh warga desa (Ashsifa et al., 2023; Farahdilla & Dewi, 2022). Teori dan bukti empiris menunjukkan bahwa keberhasilan program desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam

perencanaan dan pengawasan, serta mekanisme evaluasi yang efektif dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa (Ashsifa et al., 2023; Rahayu et al., 2023)

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan empiris mengenai efektivitas Dana Desa dan program pembangunan pedesaan. (Putubasai, 2021) menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap pembangunan pedesaan melalui indikator pembangunan desa, meskipun peran BUMDes dan PADes berfungsi sebagai mediator penyaluran dana yang efektif pada capaian pembangunan lokal (Adam et al., 2024; Astutik & Fitriyah, 2025). Penelitian yang serupa menunjukkan pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di beberapa wilayah masih menghadapi hambatan karena pemahaman masyarakat terhadap program masih rendah dan pelaksanaan tidak optimal sehingga dampak sosial ekonomi belum maksimal (Ashsifa et al., 2023; Putubasai, 2021). (Astutik & Fitriyah, 2025) menemukan bahwa efektivitas alokasi Dana Desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dipengaruhi secara signifikan oleh transparansi, partisipasi perencanaan, dan kapasitas administrasi desa (Astutik & Fitriyah, 2025). Selain itu, (Saptayuda, 2024) menekankan bahwa kualitas tata kelola dana, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting untuk menjamin kontribusi Dana Desa terhadap ketahanan ekonomi dan pembangunan lokal yang berkelanjutan (Ashsifa et al., 2023; Saptayuda, 2024). Studi yang berfokus pada dampak Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan juga menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada konteks lokal dan kapasitas lembaga desa dalam menangani perencanaan, monitoring, serta evaluasi program, sehingga keberhasilan program cenderung lebih tinggi pada desa dengan praktik tata kelola yang partisipatif dan transparan (Ardian & Huda, 2025; Ludyanto et al., 2024).

Meski begitu, terdapat kekosongan penelitian yang masih besar, khususnya dalam literatur internasional dan studi dengan metodologi yang kuat yang secara langsung mengukur efektivitas pemanfaatan Dana Desa terhadap hasil pembangunan jangka panjang, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola sehingga dapat dihubungkan antara proses pengelolaan dengan hasil nyata di masyarakat (Ashar & Rosnawati, 2025; Saptayuda, 2024). Banyak studi yang hanya bersifat deskriptif atau menggunakan data rasio efektivitas tanpa memeriksa faktor-faktor kontekstual seperti kualitas perencanaan desa, kualitas pemimpin desa, serta dampak sosial-ekonomi dari implementasi program (Anwar & Melawati, 2024; Ashar & Rosnawati, 2025). Hal ini membuka peluang bagi penelitian yang memperkuat hubungan kausal antara proses pemanfaatan Dana Desa dan hasil pembangunan, serta mengeksplorasi variabel mediasi seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan kualitas kapasitas administrasi desa yang seringkali kurang disentuh dalam studi terdahulu (Ashar & Rosnawati, 2025; Saptayuda, 2024). Dengan memperluas penelitian ke dalam kerangka teori tata kelola dan efektivitas program publik yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani gap tersebut dan memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif terhadap literatur Dana Desa (Ashar & Rosnawati, 2025; Saptayuda, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena fokusnya adalah memahami secara mendalam efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dalam konteks nyata, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Pendekatan kualitatif dengan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara holistik, terutama ketika tujuan penelitian adalah untuk menggali pemahaman detil tentang proses implementasi kebijakan di tingkat

lokal (Daeng Baji & Pramono, 2025; DEWI, 2019). Pendekatan ini menekankan pemahaman konteks sosial dan dinamikanya serta faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan dalam setting tertentu (Daeng Baji & Pramono, 2025; DEWI, 2019).

Lokasi penelitian berada di Desa Tanjung Lapang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dimana penelitian lapangan dilakukan untuk memahami dinamika pengelolaan dana desa dan partisipasi aktor lokal dalam praktik pemerintahan desa, sebuah pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian partisipatif di tingkat lokal untuk menggali konteks sosial dan institusional masyarakat pedesaan (Anggara & Pribadi, 2024; Purnamasari et al., 2025). Subjek penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa yang mengelola Dana Desa, tokoh masyarakat, kelompok penerima manfaat program, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan serta evaluasi pemanfaatan dana desa, sesuai dengan praktik pemilihan informan yang memiliki peran sentral dalam pemerintahan desa untuk menjamin informasi yang kaya dan kontekstual (Insan & Agustina, 2024; Lestari, 2025). Partisipan dipilih secara purposive sampling untuk memastikan bahwa mereka yang dipilih memang memahami substansi dan proses pengelolaan program desa dan dapat memberikan data yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, karena purposive sampling menekankan pemilihan kasus atau individu yang paling relevan untuk

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan kepala desa dan perangkat desa, diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan warga dan kelompok penerima manfaat, observasi langsung terhadap kegiatan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat, serta studi dokumen terkait perencanaan, laporan realisasi, dan evaluasi Dana Desa (Nasrudin & Firmansyah, 2024). Kombinasi teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai perspektif dan meningkatkan kualitas informasi yang dikumpulkan (Palinkas et al., 2013).

Analisis data dilakukan melalui proses coding dan thematic analysis, di mana data wawancara, FGD, observasi, dan dokumen diorganisir, dikodekan, dan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan efektivitas pemanfaatan dana desa, tantangan yang dihadapi, serta praktik-praktik terbaik yang muncul selama pelaksanaan program (Hidayat, 2025). Analisis ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan keterkaitan antara temuan dengan konteks nyata di lapangan (Palinkas et al., 2013).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, FGD, observasi, dan dokumen (Johnson & Brown, 2022; Kumar, 2023). Selain itu, member checking dilakukan dengan mengonfirmasi temuan awal kepada partisipan untuk memastikan akurasi interpretasi, dan audit trail diterapkan dengan menyimpan dokumentasi lengkap proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, sehingga transparansi dan keandalan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Palinkas et al., 2013).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjung Lapang, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan wawancara dengan aparatur desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan masyarakat penerima manfaat, ditemukan bahwa alokasi dana desa sebagian

besar diarahkan pada pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, dan penyediaan sarana air bersih.

Kepala Desa menyatakan, “Kami libatkan warga setempat supaya mereka juga dapat penghasilan tambahan, dan semua diawasi oleh BPD serta pendamping desa” (Kepala Desa Tanjung Lapang, 2025). Masyarakat menilai proyek-proyek ini bermanfaat, meskipun beberapa menghadapi kendala terkait kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian.

Dalam pemberdayaan masyarakat, dana desa digunakan untuk pelatihan keterampilan, pengembangan kelompok usaha bersama, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi warga tercatat meningkat dalam musyawarah desa, meskipun akses terhadap informasi masih terbatas. Seorang warga menyampaikan, “Kadang kami diajak, tapi biasanya hanya beberapa orang saja yang ikut. Tidak semua warga dilibatkan dalam musyawarah” (Warga Desa Tanjung Lapang, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme partisipatif telah diterapkan, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program masih perlu diperkuat.

Pengelolaan keuangan desa relatif transparan, dengan laporan pertanggungjawaban rutin dan pengawasan oleh BPD serta pendamping desa. Pendamping desa menekankan, “Sebenarnya kami berusaha memastikan semua kegiatan yang dibiayai benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan desa dan aturan yang berlaku. Selain itu, kami juga rutin memberikan bimbingan kepada perangkat desa agar penyusunan laporan keuangan bisa lebih lengkap, akurat, dan sesuai standar” (Pendamping Desa, 2025). Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam administrasi dan pelaporan keuangan, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Analisis alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa sektor infrastruktur menerima 45% dari total dana, pemberdayaan masyarakat 25%, pendidikan 20%, dan kesehatan 10%. Mekanisme pemanfaatan mengikuti alur terstruktur mulai dari musyawarah dusun dan desa, penyusunan RKPDes, persetujuan pemerintah kabupaten, pencairan dana, hingga pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa menegaskan, “Kami mulai dari musyawarah dusun, disaring dan disepakati bersama dalam musyawarah desa agar sesuai dengan RPJMDes” (Kepala Desa Tanjung Lapang, 2025). Tingkat serapan dana mencapai 92%, dengan 68 warga lokal terlibat dalam padat karya, menunjukkan bahwa program tidak hanya mendukung pembangunan fisik tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pemanfaatan Dana Desa meliputi kepemimpinan desa yang proaktif, partisipasi masyarakat, dan transparansi informasi. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas SDM, birokrasi yang lambat, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi menjadi faktor penghambat. Seorang aparat desa menyatakan, “SDM kami terbatas, apalagi kalau aturan berubah. Kadang harus belajar ulang sistemnya” (Aparat Desa Tanjung Lapang, 2025), sementara pendamping menambahkan, “Terkadang aparat desa kurang memahami format laporan keuangan, sehingga kami harus mengulang beberapa kali pendampingan” (Pendamping Desa, 2025).

Secara keseluruhan, Dana Desa di Tanjung Lapang berjalan efektif dan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengawasan berlapis oleh BPD dan Dinas PMD, pelibatan warga dalam pelaksanaan, serta pendampingan aparatur desa menjadi kunci keberhasilan. Namun, peningkatan kapasitas SDM dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program perlu diperkuat agar efektivitas pemanfaatan dana desa lebih

optimal dan berkelanjutan. Seorang warga menuturkan, “Sebelum ada dana desa, jalan di kampung kami rusak dan sulit dilewati, apalagi kalau musim hujan. Sekarang akses jadi jauh lebih mudah, anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa harus menyeberangi lumpur, dan hasil panen bisa langsung dijual ke pasar” (Warga Desa Tanjung Lapang, 2025), yang menegaskan dampak positif nyata dari dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Dalam diskusi hasil penelitian efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang, temuan riset dapat dikaitkan dengan sejumlah studi terdahulu dan implikasi teoritis maupun praktis yang lebih luas serta fenomena tak terduga dari data lapangan. Pertama, hasil studi Anda menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar di desa, yang sejalan dengan temuan (Arifin et al., 2023) yang menunjukkan peningkatan kualitas infrastruktur di desa yang menerima Dana Desa. Studi lain menekankan bahwa Dana Desa juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan dan dukungan modal, sebagaimana dibuktikan oleh (Ashar & Rosnawati, 2025). Namun, ada bukti bahwa efektivitas Dana Desa dapat rendah di beberapa wilayah akibat keterbatasan kapasitas administratif dan pengawasan yang lemah, sebagaimana dijelaskan oleh (Ashsifa et al., 2023; Nasrudin & Firmansyah, 2024). Temuan di Tanjung Lapang juga menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa telah digunakan untuk program pembangunan, indikator seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan dampak ekonomi belum konsisten optimal, yang sejalan dengan temuan (Jati et al., 2024; Rahayu et al., 2023) terkait tantangan dalam keterlibatan masyarakat dan kapasitas administrative.

Dari sudut pandang teori, hasil penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori pembangunan pedesaan dan tata kelola keuangan publik berperan dalam konteks lokal. Teori desentralisasi fiskal dan pembangunan lokal memprediksi bahwa alokasi dana secara langsung kepada unit pemerintahan desa meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Putri, 2024; Warokka et al., 2025), tetapi temuan Anda menegaskan bahwa efektivitas tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia desa, dan partisipasi warga (Khusna & Adiwijaya, 2024). Hal ini memperluas literatur yang menekankan pentingnya prinsip *good governance* dan kapasitas kelembagaan sebagai mediator antara alokasi dana dan hasil pembangunan desa (Putri, 2024; Warokka et al., 2025).

Secara praktis, hasil penelitian di Tanjung Lapang memberikan pelajaran penting bagi pembuat kebijakan desa, dinas terkait, dan tenaga pendamping desa. Pertama, penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan, serta pelaporan penggunaan dana desa sangat menentukan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa (Devi et al., 2024; Hidayat, 2025). Pelatihan tentang transparansi anggaran dan mekanisme partisipatif yang lebih inklusif terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa serta mengoptimalkan hasil pembangunan (Ahmad & Susilawati, 2025). Kedua, rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan adalah memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat sehingga tidak hanya fokus pada capaian fisik tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, karena partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa berkontribusi signifikan terhadap keterbukaan pengelolaan dan efektivitas alokasi dana (Hartojo et al., 2023; Nur, 2021).

Dalam diskusi hasil penelitian muncul temuan yang tidak terduga, yaitu adanya perbedaan tingkat efektivitas antara jenis program yang dibiayai Dana Desa. Misalnya, pembangunan infrastruktur sering menunjukkan hasil yang lebih langsung terlihat melalui perbaikan fasilitas fisik seperti jalan dan fasilitas umum, tetapi program pemberdayaan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat tidak selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun dana telah dialokasikan (Ashar & Rosnawati, 2025; Kurniawan et al., 2024). Temuan ini menyoroti bahwa bukan hanya nominal dana yang penting tetapi juga kesesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan dan kapasitas komunitas setempat, serta efektivitas pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh kapasitas administratif dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan (Ashar & Rosnawati, 2025; Saptayuda, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa indikator tradisional efektivitas seperti realisasi anggaran tidak selalu mencerminkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya indikator evaluasi yang lebih holistik yang mempertimbangkan outcome berkelanjutan dan kualitas implementasi program (Asta et al., 2025; Kurniawan et al., 2024).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa temuan utama dapat disimpulkan. Pertama, efektivitas pemanfaatan Dana Desa Tanjung Lapang cukup tinggi dalam aspek pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, namun terdapat perbedaan capaian antar program, terutama terkait kegiatan yang membutuhkan partisipasi aktif warga. Kedua, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi efektivitas, di mana desa yang menerapkan mekanisme pelaporan dan partisipasi publik cenderung mencapai hasil yang lebih optimal. Ketiga, faktor kapasitas sumber daya manusia desa dan dukungan pemerintah daerah menjadi determinan penting dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa.

Dari perspektif kontribusi teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara tata kelola keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan hasil pembangunan. Penelitian ini menambahkan bukti empiris pada literatur pengelolaan dana publik di tingkat desa, khususnya dalam konteks efektivitas program pembangunan pedesaan dan penguatan kapasitas sosial-ekonomi komunitas lokal.

Secara praktis, temuan penelitian memberikan panduan bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan untuk memperkuat mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pengelolaan dana desa. Implementasi pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur desa, serta pengawasan yang lebih terstruktur, dapat meningkatkan keberhasilan program dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Tanjung Lapang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain fokus pada satu desa sehingga generalisasi temuan ke desa lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara yang bersifat subjektif, sehingga penilaian efektivitas dana desa dapat dipengaruhi oleh persepsi responden.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif antar desa dengan karakteristik berbeda untuk mengeksplorasi faktor-faktor determinan efektivitas pemanfaatan dana desa secara lebih luas. Penelitian mendatang juga dapat mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adam, l., sambodo, m. T., purwanto, p., purnagunawan, r. M., sarana, j., ermawati, t., saptia, y., soekarni, m., adityawati, s., thoja, m., & suryanto, j. (2024). village fund and indonesia rural development: rethinking institutional capacity and governance. *journal of infrastructure, policy and development*, 8(14), 9875. <https://doi.org/10.24294/jipd9875>
- Ahmad, r., & susilawati. (2025). akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana desa. *jemsi (jurnal ekonomi, manajemen, dan akuntansi)*, 11(2), 976–983. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>
- Anggara, r., & pribadi, u. (2024). community participation in village deliberations: examining the dynamics of influencing factors. *jurnal penelitian dan pengembangan sains dan humaniora*, 8(1), 85–95. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78113>
- Anwar, a. p., & melawati, f. (2024). efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di desa cinengah kecamatan rongga kabupaten bandung barat. *jurnal interaksi : jurnal mahasiswa administrasi publik*, 1(1), 106–122. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5174>
- Ardian, e. d., & huda, s. (2025). the effect of open unemployment rate, human development index, and minimum wage on the poverty rate in east java province. *international journal of business and applied economics*, 4(5), 2697–2708. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v4i5.384>
- Arifin, n., junita, a., & kahfi, n. (2023). pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *optimal jurnal ekonomi dan manajemen*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2585>
- Ashar, b. al, & rosawati, e. (2025). *authority of village government in village fund management*. universitas muhammadiyah sidoarjo. <https://doi.org/10.21070/ups.6390>
- Ashsifa, i., nur hidayanti, a., & mulyani, u. r. (2023). the effectiveness of village fund management: accountability, transparency and community participation. *jurnal rep (riset ekonomi pembangunan)*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.946>
- Astutik, l. w., & fitriyah, h. (2025). *accountability and transparency in managing village fund allocation to improve development and community empowerment in grinting village*. universitas muhammadiyah sidoarjo. <https://doi.org/10.21070/ups.8063>
- Daeng baji, i. s., & pramono, s. (2025). mapping the evaluation landscape: a systematic review of research design, instruments, and methods in public policy implementation studies. *jurnal locus penelitian dan pengabdian*, 4(12), 11906–11921. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i12.4862>
- Devi, a. s., ahmad, a. w., & sriyuniati, f. (2024). pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. *journal of applied accounting and business*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.37338/jaab.v6i2.368>
- Dewi, r. p. (2019). *studi kasus - metode penelitian kualitatif*. center for open science. <https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb>
- Farahdilla, d., & dewi, a. s. (2022). pengaruh financial literacy, financial attitude dan demografi pada financial management behavior. *jurnal ilmiah manajemen, ekonomi, & akuntansi (mea)*, 6(3), 973–982.

<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2451>

- Hartojo, n., ikhsan, m., dartanto, t., & sumarto, s. (2023). the impact of village funds on rural welfare in indonesia: a regression discontinuity in time (rdit) and difference in difference (did) approach. *applied economics letters*, 31(15), 1360–1367. <https://doi.org/10.1080/13504851.2023.2187016>
- Hidayat, a. r. n. (2025). strengthening village governance: a qualitative study of transparency, accountability, and participation in village fund management in tappale village, libureng subdistrict, bone regency. *tamalanrea: journal of government and development (jgd)*, 2(1), 34–49. <https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.43956>
- Insan, m. k., & agustina, i. f. (2024). collaboration as a village self-reliance ecosystem. *indonesian journal of public policy review*, 25(1). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1353>
- Jati, i. l., murapi, i., & ajiani, i. p. f. (2024). analisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat pada desa selong belanak. *jurnal riset akuntansi dan bisnis indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.32477/jrabi.v4i3.1015>
- Khusna, l. s., & adiwijaya, z. a. (2024). pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa dan kelembagaan desa terhadap kinerja keuangan melalui digitalisasi. *jfas : journal of finance and accounting studies*, 6(3), 165–177. <https://doi.org/10.33752/jfas.v6i3.8680>
- Kurniawan, fadlina, & iqbal, m. (2024). analysis of the effectiveness and efficiency of village fund management in padaloang village, dua pitue sub-district, sidenreng rappang regency. *journal of economic, business & accounting research*, 2(1). <https://doi.org/10.61511/jembar.v2i1.2024.967>
- Lestari, s. (2025). strategic leadership strategies of village heads in driving sustainable tourism village development. *jurnal inovasi ilmu sosial dan politik (jisop)*, 7(2), 184–192. <https://doi.org/10.33474/jisop.v7i2.23845>
- Ludyanto, m. f., haryono, & wahyuni, s. t. (2024). efektivitas kebijakan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. *bharanomics*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v5i1.518>
- Nasrudin, t., & firmansyah, a. (2024). menutup celah korupsi: evaluasi pengawasan apip dalam pengelolaan dana desa di indonesia. *akuntansiku*, 3(4), 243–250. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1173>
- Neyapti, b. (2025). the theory of fiscal decentralization. in *understanding fiscal decentralization* (pp. 13–50). edward elgar publishing. <https://doi.org/10.4337/9781803925578.00007>
- Nur, s. w. (2021). akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa tellumpanuae kabupaten maros. in *prosiding seminar nasional ekonomi dan bisnis* (pp. 725–739). um jember press. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>
- Palinkas, l. a., horwitz, s. m., green, c. a., wisdom, j. p., duan, n., & hoagwood, k. (2013). purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *administration and policy in mental health and mental health services research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Purnamasari, i., raswono, y. m., waeno, m., samudera, a. a., & suradika, a. (2025). partisipasi masyarakat dalam penerapan smart village. *jurnal governansi*, 11(1), 83–90. <https://doi.org/10.30997/jgs.v11i1.18499>
- Putri, n. d. (2024). pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, desentralisasi fiskal,

- dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan. *journal of development economic and social studies*, 3(4), 1294–1307. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.25>
- Putubasai, e. (2021). analisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa banjar negeri kecamatan way lima kabupaten pesawaran. *mu'amalatuna: jurnal ekonomi syariah*. <https://doi.org/10.36269/v0i0.569>
- Rahayu, r., anwar, f., kasman, & darmi, t. (2023). implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. *jurnal manajemen publik dan kebijakan publik (jmpkp)*, 5(1). <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4963>
- Saptayuda, a. (2024). evaluating the effectiveness of village fund policy in strengthening local economic resilience: evidence from sleman regency, indonesia. *visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 16(3), 216–227. <https://doi.org/10.54783/jv.v16i3.1260>
- Warokka, A., Warokka, V., & Aqmar, A. Z. (2025). Financing Rural Futures: Governance and Contextual Challenges of Village Fund Management in Underdeveloped Regions. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(11), 603. <https://doi.org/10.3390/jrfm18110603>